

**ANALISIS AKTOR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BRT (*BUS RAPID TRANSIT*) SEMARANG DALAM MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG**

**Novriyaldi, Nina Widowati, Maesaroh**

Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296  
Telpon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: <https://fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Transport has a role very strategically in the process of infrastructure development activities in urban areas. The emergence of the policy Bus Rapid Transit in Semarang was triggered by the efforts of the improvement of public transport is conducted by the Government of Semarang, Department of Transportation, and Public service Agencies Bus Rapid Transit Semarang. The research aims to analyze the role of actors and explain the driving factors and inhibiting factors for the success of the actor's role in achieving the objectives of the implementation of the policy BRT Semarang in addressing traffic congestion in the City of Semarang. This research uses descriptive qualitative research methods, data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that the role of the society is still relatively small because there is no interest and power possessed by the community as an actor in implementing Semarang's BRT policy, the inhibiting factors for the success of the actor's role are still not optimal in participation in supervision carried out by the government, human resources owned by the Semarang BRT Public Service Agency and participation, accessibility and the level of community knowledge in the implementation of Semarang's BRT policy. Suggestions that researchers can give, To increase the role of the community, the Government, the Department of Transportation and the Semarang BRT Public Service Agency need to provide socialization for the community. The Semarang City Government needs to increase participation in supervision, the BRT Public Service Agency needs to increase human resources for drivers in supporting performance in the operation of the Semarang BRT and in increasing participation, accessibility and the level of community knowledge all the main actors need to provide support and guidance.

Keywords: Implementation, Actor, BRT, Congestion

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semarang merupakan Kota Metropolitan yang menduduki peringkat keenam di Indonesia. Semarang sebagai salah satu Kota yang memiliki perkembangan yang pesat di antara kota-kota lainnya seperti, Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar dan Bandung. Pada Tahun 2020 jumlah penduduk yang dimiliki Kota Semarang adalah 1.680.417 jiwa (Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2020).

Kemacetan lalu lintas merupakan suatu masalah yang tidak bisa terelakan terjadi di Kota Semarang. Pertumbuhan penduduk baik secara alami ataupun berasal dari masyarakat pendatang menjadi salah satu aspek pemicu dari terjadinya kemacetan lalu lintas ini. Hal ini tentunya memicu banyaknya kendaraan pribadi yang dimiliki oleh penduduk sehingga terjadinya penumpukan kendaraan di jalanan, menimbulkan padatnya arus lalu lintas. Akan menjadi semakin

parah karena ditambah lagi dengan rasio lebar jalan yang sudah tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang melalui. Meningkatnya kuantitas kendaraan pribadi tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi umum mengakibatkan susah untuk mengurai kemacetan lalu lintas

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Semarang mulai merealisasikan Kebijakan BRT (*Bus Rapid Transit*) yang dilatar belakangi oleh Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 tahun 2008 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 tentang penyediaan pelayanan publik.

Pada mekanisme pengelolaan BRT (*Bus Rapid Transit*) melibatkan beberapa aktor kebijakan. Disini Pemerintah Kota Semarang selaku pihak pertama sebagai lembaga eksekutif yang memiliki tugas pokok untuk menentukan beberapa kebijakan di dalam pengimplementasian BRT. Pemerintah Kota Semarang menunjuk Dinas Perhubungan Kota Semarang

sebagai pihak kedua yang berfungsi menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Semarang untuk urusan perencanaan dan pengurusan urusan operasional BRT. Selanjutnya Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yakni Badan Layanan Umum BRT Semarang yang memiliki urgensi pengelolaan dan pengoperasian dari Bus Rapid Transit Semarang.

Berdasarkan hasil pengamatan pra-penelitian dalam berjalnya proses implementasi kebijakan BRT Semarang yang dilakukan oleh aktor kebijakan, peneliti menemukan masih belum optimalnya kebijakan BRT Semarang ini menjadi alternatif kebijakan yang berfungsi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Semarang khususnya pada jalur koridor yang dilalui seperti Jalan Pemuda dan Jalan Imam Bonjol. Bersumber dari [Jateng.tribunews.com](http://Jateng.tribunews.com) titik jalan yang memiliki volume padat kendaraan berada di Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Menteri Supeno, Jalan MT haryono dan jalan Veteran.

**Gambar 1.1**  
**Kemacetan Arus Lalu Lintas**



*Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti*

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa kepadatan arus lalu lintas di Kota Semarang yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas masih belum bisa ditangani dengan baik, yang sejatinya dalam 11 tahun kebijakan BRT Semarang ini beroperasi sudah bisa diandalkan oleh pemerintah kota semarang dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Semarang beserta birokrasi pendukung dalam pengoperasian kebijakan BRT yakni Badan Layanan Umum BRT Semarang.

Didalam Peraturan Walikota Semarang No. 1 Tahun 2017 tentang “Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum UPTD Trans Semarang” menjelaskan misi dari BRT Semarang

yaitu mendorong berkembangnya transportasi perkotaan yang dapat diandalkan dan berkesinambungan serta meningkatkan sarana dan prasarana transportasi. Peranan dari setiap aktor yang terlibat dalam kebijakan BRT Semarang ini harus bisa dioptimalkan guna mencapai tujuan utama dari diimplementasikannya kebijakan BRT ini.

Pada teori yang dikemukakan oleh Grindle bahwa peran aktor kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan publik, hal ini berdasarkan variabel konten ataupun variabel konteks pada kegiatan implementasi kebijakan yang didalamnya terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa berhasilnya kegiatan implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh kedudukan yang dimiliki oleh aktor, pelaksana kebijakan oleh aktor, kekuasaan, karakteristik lembaga, dan inisiatif dari aktor.

Peneliti ingin menganalisis lebih dalam mengenai salah satu tahapan dalam kebijakan publik yaitu tahap implementasi kebijakan. Hal ini

dikarenakan karena proses implantasi merupakan proses dimana tujuan kebijakan dilaksanakan. Selanjutnya penelitian ini akan memfokuskan pada peran dan faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan peran aktor kebijakan yang terlibat dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan (Bus Rapid Transit) BRT Semarang dalam mengatasi kemacetan lalu lintas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran aktor pada implementasi kebijakan BRT Semarang dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor pendorong dan faktor pengambat keberhasilan peran aktor yang terlibat pada implementasi kebijakan BRT Semarang dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis peran aktor pada implementasi kebijakan BRT (*Bus Rapid Transit*) Semarang

dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Semarang.

2. Untuk menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan peran aktor yang terlibat pada implementasi kebijakan BRT Semarang dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Semarang.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Administrasi Publik**

Administrasi publik merupakan suatu proses yang mana sumber daya dan aparatur publik dikoordinasikan dan diorganisir untuk dapat diformulasikan, diimplementasikan dan dikelola sebagai suatu keputusan dalam kebijakan publik (Chandler dan Plano dalam Keban, 2014: 3). Kedua penulis ini juga menyatakan administrasi publik adalah suatu ilmu dan seni (*science and art*) dengan tujuan mengatur urusan publik dan melakukan berbagai macam tugas yang telah diterapkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian teori tersebut, maka administrasi publik

adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks. Maka dari itu untuk menjawab permasalahan ini peneliti akan memasukan konsep dasar dari Administrasi Publik.

##### **2. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang diambil pemerintah untuk menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat dan lingkungan pemerintahan (Thomas R. Dye, dalam Inu Kencana Syafie 2010:105). Ada dua karakteristik kebijakan publik menurut Nugroho yaitu yang pertama kebijakan publik adalah sebuah hal yang mudah untuk diukur karena ukurannya yang jelas seperti seberapa jauh pencapaian tujuan yang sudah diharapkan, yang berikutnya kebijakan publik adalah istilah sangat mudah untuk dipahami, karena makna dari kebijakan publik itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan dan direncanakan untuk mencapai tujuan bersama ataupun tujuan nasional. Beberapa proses tahapan yang

harus dilakukan untuk melaksanakan Kebijakan Publik yaitu meliputi penyusunan rencana atau agenda kebijakan publik, proses untuk merumuskan atau formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan, dan yang terakhir evaluasi terhadap pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2007: 32-34).

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kebijakan publik adalah ada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat meliputi, analisis suatu permasalahan dan pemecahan masalah publik. Selanjutnya, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif, dianggap positif apabila kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar akan menyelesaikan permasalahan publik, dan negatif apabila dalam proses perumusan kebijakan pemerintah membawa kepentingan pribadi/golongan tertentu sehingga mempengaruhi kebijakan yang akan dihasilkan, hal tersebut akan

menyebabkan permasalahan publik yang baru. Belum tentu suatu kebijakan akan menjawab semua permasalahan.

### **3. Implementasi Kebijakan**

Lineberry (dalam Fadillah, 2003:81) menyatakan bahwa implementasi adalah sebuah tindakan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik secara mandiri atau bekerjasama untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pada kebijakan yang sudah direncanakan. Sedangkan menurut Grindle implementasi merupakan proses dari sebuah kebijakan yang hanya dapat dilakukan jika sasaran dan tujuan dari kebijakan tersebut sudah diputuskan, disahkan, dan pelaksanaan kegiatan sudah terorganisir untuk mencapai tujuan (Mulyadi, 2016:47).

Implementasi kebijakan dipandang sebagai perwujudan dari bukti nyata kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurung waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses

pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan serta direncanakan oleh pemerintah atau pihak lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati dalam kebijakan itu. Pada penelitian ini peneliti menganalisis aktor dari implementasi kebijakan BRT (*Bus Rapid Transit*) Semarang dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Semarang, guna melihat peran yang dimiliki oleh para aktor kebijakan ini dalam mencapai tujuan dari kebijakan BRT Semarang.

#### **4. Aktor Implementasi Kebijakan**

Didalam penelitian Albertus Kevin (2019) yang termuat dalam [eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id) menjelaskan bahwa pada teori marille S. Grindle kita dapat melihat bahwasanya aktor implementasi kebijakan atau implementator memiliki pengaruh yang amat besar terhadap keberhasilan dari kegiatan implementasi kebijakan. Hal tersebut dapat kita lihat dari variabel konten ataupun variabel konteks pada kegiatan implementasi kebijakan yang didalamnya terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa berhasilnya kegiatan implementasi kebijakan

publik akan sangat dipengaruhi oleh Kedudukan yang dimiliki oleh aktor, Pelaksana kebijakan oleh aktor, Kekuasaan, Karakteristik Lembaga, dan Inisiatif dari Aktor. Berdasarkan lima hal tersebut, membuktikan bahwasanya Grindle memiliki pendapat bahwa aktor implementasi kebijakan memiliki peranan yang vital dalam pencapaian keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik.

#### **5. Peran Aktor kebijakan**

Peneliti akan menggunakan *grid power* dan *interest* yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan dari aktor kebijakan ini dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan.

Pembagian aktor tersebut antara lain:

1. *Key Player*

Merupakan aktor yang memiliki kepentingan dan kekuatan yang tinggi.

2. *Subjects*

Merupakan aktor yang memiliki kepentingan tinggi akan tetapi

sebaliknya kekuatan yang dimilikinya rendah.

3. *Context Setters*

Merupakan aktor yang memiliki kepentingan yang rendah akan tetapi mempunyai kekuatan yang tinggi.

4. *Crowd*

Merupakan aktor yang memiliki kepentingan dan kekuatan yang sama sama rendah.

Dalam proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh aktor kebijakan tidak terlepas dari kepentingan atau *Nilai*. Dalam penelitian ini peneliti menjabarkan 4 jenis *Nilai* yang dimaksud, sebagai berikut:

1. *Nilai Politik*

Menjelaskan bahwa ada muatan nilai politik yang dibawa oleh aktor kebijakan dalam proses implementasi kebijakan.

2. *Nilai Lembaga*

Menjelaskan bahwa pada hirarki dalam suatu lembaga, para aktor yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi

memiliki kesempatan untuk menekankan nilai kepada aktor lainya yang memiliki kedudukan di bawahnya.

3. *Nilai Pribadi*

Menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan adanya nilai pribadi yang dibawa oleh para aktor kebijakan, sehingga selain mencapai tujuan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya disini aktor kebijakan juga ingin mencapai tujuan pribadi yang dibawanya.

4. *Nilai Kebijakan*

*Nilai* yang terakhir ini menjelaskan bawa dalam proses implementasi kebijakan nilai yang telah dibawa dari awal benar benar diterapkan dalam mencapai tujuan oleh aktor implementasi kebijakan. Kebijakan publik memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik (Lester dan Stewart, 2000)

**Power** yang dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan juga memiliki

pengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Menurut French dan Raven (dalam Ambar, 2017:38) menjelaskan bahwa dalam memahami *power* (kekuasaan) perlu dipahami perbedaan dari sumber kekuasaan tersebut, dalam penelitian ini peneliti menjabarkan lima *power* yang dapat mempengaruhi kebijakan. Sebagai berikut:

1. *Reward Power*

Menjelaskan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh aktor kebijakan mereka melakukannya dengan *power* yang diberikan oleh pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari aktor yang terlibat.

2. *Legitimate Power*

Merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki oleh aktor kebijakan diperoleh dengan cara yang formal berdasarkan payung hukum dalam suatu lembaga

3. *Coercive Power*

Menjelaskan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh seorang

pemimpin untuk mempengaruhi pihak yang memiliki posisi dibawahnya berasal dari dari kekuatan paksaan.

4. *Referent Power*

Menjelaskan bahwa kekuasaan yang dimiliki pemimpin berasal dari referensi yang dia miliki, sehingga disini dapat dipahami bahwa semakin baik sifat yang dimiliki oleh pemimpin semakin banyak anak buah yang menyukainya.

5. *Expert Power*

Menjelaskan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin bersumber dari kemampuan yang dimilikinya.

## **6. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Keberhasilan Peran Aktor**

Ghana Abdillah (dalam Hsunul yakin, 2011) menjelaskan ada 5 unsur yang perlu dipahami dalam mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan peran aktor dalam proses implementasi kebijakan publik meliputi:

#### 1. Partisipasi Aktor

Diartikan sebagai keterlibatan dari aktor dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta ikut serta memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kewajibannya dalam implementasi kebijakan tersebut.

#### 2. Aksesibilitas Aktor

Dalam proses implementasi kebijakan, aksesibilitas aktor memiliki pengertian yaitu akses atau kemudahan yang dimiliki oleh aktor dalam mendapatkan informasi dari atas maupun bawah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

#### 3. Pengetahuan Aktor

Disini dapat diketahui bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh aktor-aktor kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut, meliputi cara mengambil langkah jika terjadi permasalahan dalam proses implementasi kebijakan.

#### 4. Sumberdaya

Berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh aktor dalam mencapai tujuan dalam kegiatan implementasi kebijakan.

#### 5. Strategi Koordinasi

Berkaitan dengan bagaimana strategi yang digunakan oleh para aktor kebijakan dalam melakukan kegiatan koordinasi dalam kepentingan implementasi kebijakan

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif kualitatif. Lokasi dari penelitian di Kota Semarang. Penentuan narasumber menggunakan teknik snowball dengan bantuan *key informan*. Informan awal pada penelitian ini adalah Pemerintah Kota Semarang, Dinas Perhubungan, Badan Layanan Umum BRT Semarang dan Masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari observasi dan wawancara dengan informan penelitian, selanjutnya data sekunder berasal dari kegiatan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara observasi dan

dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Kualitas data menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Aktor**

1. Pemerintah Kota Semarang sebagai pemain kunci (*key player*)

a. Kepentingan

Kepentingan (*interest*) atau nilai yang dibawa oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai aktor implementasi kebijakan BRT Semarang tergolong tinggi, hal ini berasal dari kepentingan politik, lembaga atau kelompok, diri pribadi dan nilai kebijakan yang dibawa.

b. Kekuasaan

Pemerintah Kota Semarang mempunyai kekuasaan yang tinggi karena memiliki posisi paling tinggi dalam

urusan penyelenggaraan kebijakan publik atau dikenal sebagai *leader sector*.

2. Dinas Perhubungan sebagai *subject*

a. Kepentingan

Dinas Perhubungan mempunyai peran sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Semarang sehingga disini kepentingan yang dibawa oleh Dinas Perhubungan sejalan dengan kepentingan yang dibawa oleh Pemerintah Kota Semarang

b. Kekuasaan

Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki kekuasaan yang tinggi. Dinas Perhubungan memiliki kendali atas Badan Layanan Umum BRT Semarang, karena dibawah langsung oleh Unit Pelayanan Teknis dari Dinas Perhubungan.

3. Badan Layanan Umum BRT Semarang sebagai *content setter*

a. Kepentingan

Kepentingan Badan Layanan Umum BRT Semarang tergolong tinggi, hal ini sangat

didukung dengan nilai pribadi yang dibawa untuk memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa layanan transportasi BRT.

b. Kekuasaan

Badan Layanan Umum BRT Semarang memiliki kekuasaan yang tergolong kecil. Hal ini karena Badan Layanan Umum BRT Semarang berada dibawah koordinasi Unit Pelayanan Teknis Dinas Perhubungan Kota Semarang.

4. Masyarakat pengguna jasa layanan BRT Semarang sebagai *Crowd*

a. Kepentingan

Masyarakat tidak memiliki kepentingan politik, lembaga dan kebijakan. Sehingga Masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi BRT dalam keterlibatannya sebagai aktor dalam proses implementasi kebijakan BRT Semarang memiliki kepentingan kecil.

b. Kekuasaan

Kekuasaan yang dimiliki oleh Masyarakat sebagai pengguna

layanan transportasi BRT dalam keterlibatannya sebagai aktor dalam proses implementasi kebijakan BRT Semarang juga tergolong kecil.

## **B. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Keberhasilan Peran Aktor**

### 1. Pemerintah Kota Semarang

a. Partisipasi Aktor

Pemerintah Kota Semarang sebagai *leader sector* dalam proses implementasi kebijakan BRT Semarang, artinya disini partisipasi Pemerintah sebagai aktor utama yang terlibat dalam munculnya kebijakan ini meliputi perumusan masalah implementasi monitoring dan evaluasi kebijakan. Namun, pada temuan peneliti menunjukkan bahwa partisipasi pemerintah belum optimal dalam kegiatan pengawasan dari berjalanya proses implementasi kebijakan, sehingga disini mengakibatkan kebijakan BRT Semarang

masih belum optimal dalam mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di Kota Semarang.

b. Aksesibilitas Aktor

Akses yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang sangat luas meliputi menyampaikan informasi ataupun dalam memberikan instruksi kepada aktor lainya serta membuat produk hukum yang mengatur tata laksana proses kebijakan.

c. Pengetahuan Aktor

Pemerintah Kota Semarang memiliki pengetahuan yang tinggi dalam proses kebijakan BRT Semarang, karena kemunculan kebijakan BRT Semarang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Semarang.

d. Sumberdaya

Pemerintah Kota Semarang memiliki sumberdaya keuangan berasal dari APBD Kota Semarang, yang kedua sumberdaya manusia yang dalam hal ini pegawai dan yang terakhir sumberdaya kemitraan

sebagai pendukung dalam berjalannya implementasi kebijakan BRT Semarang.

e. Strategi Koordinasi

Strategi koordinasi yang digunakan oleh Pemerintah adalah saling komunikatif.

## 2. Dinas Perhubungan

a. Partisipasi Aktor

Sebagai Perpanjangan tangan dari pemerintah yang berpartisipasi dalam perumusan dan proses implementasi kebijakan BRT Semarang dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Semarang.

b. Aksesibilitas Aktor

Memiliki akses dalam informasi penting dari dan oleh Pemerintah Kota Semarang dan juga memiliki akses dalam memberikan instruksi kepada badan layanan Umum BRT Semarang.

c. Pengentahuan Aktor

Memiliki pengetahuan yang tinggi dalam partisipasinya sebagai aktor implementasi kebijakan BRT Semarang.

- d. Sumberdaya  
Dinas Perhubungan memiliki sumberdaya keuangan berasal dari subsidi oleh Pemerintah Kota Semarang bersumber dari APBD Kota Semarang dan target setoran dari BRT. Sumberdaya Manusia terdiri dari staff dan pimpinan di Dinas Perhubungan dan yang terakhir sumberdaya kemitraan, disini Dinas Perhubungan melakukan kerjasama dengan Perbankan dalam urusan keuangan dan Pertamina dalam urusan penyediaan bahan bakar transportasi BRT.
- e. Strategi Koordinasi  
Dinas Perhubungan memiliki sikap yang responsive.

### 3. Badan Layanan Umum BRT Semarang

- a. Partisipasi Aktor  
Sebagai pelaksana kebijakan dalam hal ini bertanggung jawab atas urusan pengoperasian BRT Semarang.
- b. Aksesibilitas Aktor

Memiliki akses yang mencakup urusan operasional dan kemudahan dalam koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Semarang.

- c. Pengetahuan Aktor  
Badan Layanan Umum BRT yang mengurus pengoperasian BRT memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap kebijakan BRT Semarang.
- d. Sumberdaya  
Sumberdaya yang dimiliki oleh Badan layanan Umum BRT Semarang berupa sumber daya Keuangan/ modal yang berasal dari APBD Kota Semarang sebesar 159 Milyar dan target retribusi dari pengoperasian BRT sebesar 33 Milyar Rupiah. Selanjutnya sumber daya manusia terdiri dari karyawan dan pimpinan, disini peningkatan kualitas sumberdaya karyawan Badan Layanan Umum BRT Semarang dilakukan dengan kegiatan pelatihan seperti contohnya pada pengemudi BRT dilibatkan polisi dalam

memberikan dasar-dasar latihan mengemudi. Namun dalam kegiatan pengoperasian BRT Semarang yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum BRT Semarang ada kendala yang dihadapi dalam mengatasi kemacetan lalu lintas yakni sumber daya manusia dalam hal ini pengemudi yang belum mumpuni, hal ini disebabkan tidak tepat waktunya kedatangan armada BRT serta selang waktu yang lama dari shelter awal menuju shelter berikutnya.

- e. Strategi Koordinasi  
Membangun koordinasi yang baik dengan semua karyawan dan Dinas Perhubungan

#### 4. Masyarakat pengguna Jasa Layanan BRT Semarang

- a. Partisipasi Aktor  
Sebagai pengguna jasa layanan transportasi BRT Semarang.
- b. Aksesibilitas Aktor  
Mempunyai akses dalam menggunakan layanan transportasi BRT Semarang.

- c. Pengetahuan Aktor  
Masyarakat tidak begitu memahami kegiatan proses implementasi kebijakan BRT.
- d. Sumberdaya  
Memiliki sumberdaya sumber daya informasi dan partisipasi.
- e. Strategi Koordinasi  
Dalam memberikan aspirasi berupa kritik maupun saran dari keberjalanan kebijakan BRT Semarang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

#### 1. Peran Aktor implementasi kebijakan BRT Semarang

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul Analisis Aktor Implementasi Kebijakan BRT (*Bus Rapid Transit*) Semarang Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Semarang, Dinas perhubungan dan Badan Layanan Umum BRT Semarang memiliki peran besar dalam implementasi kebijakan BRT Semarang dilihat dari kepentingan

(*Interest*) dan kekuasaan (*Power*) yang dimiliki oleh aktor dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan. Namun sebaliknya peranan yang dimiliki oleh masyarakat masih tergolong kecil.

## 2. Faktor Pendorong Keberhasilan Peran Aktor

Pada analisis faktor pendorong keberhasilan peran aktor implementasi kebijakan BRT (Bus Rapid Transit) Semarang dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Semarang diperoleh faktor pendorong keberhasilan peran Pemerintah Kota Semarang terdiri dari aksesibilitas sangat luas, sumberdaya mumpuni yang terdiri dari Sumberdaya Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Sumberdaya Kemitraan, serta memiliki sistem koordinasi yang komunikative.

Faktor pendorong keberhasilan peran Dinas Perhubungan terdiri dari partisipasi yang aktif dalam perumusan dan proses implementasi kebijakan BRT Semarang, memiliki aksesibilitas yang luas, memiliki pengetahuan yang tinggi, memiliki sumberdaya mumpuni yang terdiri dari Sumberdaya Keuangan, Sumber Daya Manusia dan

Sumberdaya Kemitraan, dan sistem koordinasi yang responsive.

Faktor pendorong keberhasilan peran Badan Layanan Umum BRT Semarang terdiri dari partisipasi aktif sebagai pelaksana kebijakan dalam hal ini bertanggung jawab atas urusan pengoperasian BRT Semarang, memiliki aksesibilitas cukup luas, pengetahuan yang tinggi, dan sistem koordinasi yang koordinatif.

Faktor pendorong keberhasilan peran Masyarakat sebagai pengguna jasa layanan transportasi BRT Semarang terdiri dari Sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat berupa sumber daya informasi dan partisipasi. Selanjutnya Strategi koordinasi berupa kritik maupun saran dari keberjalanan kebijakan BRT Semarang.

## 3 Faktor Penghambat Keberhasilan Peran Aktor

Pada analisis faktor penghambat keberhasilan peran aktor implementasi kebijakan BRT (Bus Rapid Transit) Semarang dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Semarang diperoleh faktor penghambat

keberhasilan peran Pemerintah Kota Semarang berasal dari partisipasi pemerintah pada kegiatan pengawasan, hal ini disebabkan belum di semua titik padat penumpukan kendaraan dilengkapi oleh CCTV yang berguna sebagai media monitoring bagi pemerintah.

Faktor penghambat keberhasilan peran Badan Layanan Umum BRT Semarang berasal dari sumber daya manusia pada pengemudi yang belum mumpuni, hal ini menyebabkan tidak tepat waktunya kedatangan armada BRT serta selang waktu yang lama dari shelter awal menuju shelter berikutnya.

Faktor penghambat keberhasilan peran Masyarakat sebagai aktor implementasi kebijakan BRT Semarang berasal dari partisipasi, aksesibilitas dan tingkat pengetahuan masih sangat rendah. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam kegiatan implementasi kebijakan BRT Semarang karena masyarakat merupakan sumberdaya utama dan sasaran utama bagi keberjalanan kebijakan BRT Semarang.

## **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan peran masyarakat, disini Pemerintah, Dinas Perhubungan dan BLU sebagai aktor utama kebijakan BRT Semarang harus melibatkan peran masyarakat secara langsung melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan BRT Semarang dan manfaat yang diperoleh jika masyarakat menggunakan transportasi BRT Semarang.
2. Untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Kota Semarang dalam kegiatan pengawasan perlu melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam untuk menambah media monitoring CCTV di beberapa titik yang belum tersedia. Untuk meningkatkan SDM pada staf pengemudi dari Badan Layanan Umum BRT Semarang, perlu melakukan pelatihan ataupun proses seleksi ulang sehingga dalam pengoperasian BRT pengemudi bisa gesit dan

berdampak baik pada percepatan selang waktu kedatangan armada BRT dari satu koridor ke koridor selanjutnya. Dan untuk mengoptimalkan faktor pendorong keberhasilan peran masyarakat berupa partisipasi, aksesibilitas dan pengetahuan, aktor utama kebijakan perlu memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Agustino, Leo (2008) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahaya (2016) *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Irawati, Erna, dkk. (2017). *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan Edisi Revisi*. Jakarta: Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara.
- Keban, Yeremias T (2014) *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kusumanegara, Solahuddin (2010) *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Makasar: Gava Media
- Lembaga Administrasi Negara (2015) *Modul III: Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping)*. Jakarta
- Moleong, Lexy J (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant, 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono, AG (2005) *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suwitri, Sri. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Undip: Semarang
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI)

### Sumber Jurnal:

- Kurniawan, Irvan Arif. (2016). *Evaluasi kebijakan Transportasi Publik Bus Transjakarta (BUSWAY) dalam Rangka Mengurangi Kemacetan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Vol 9.
- Listifadah. Puspitasari, Reni. (2015). *Evaluasi Kinerja Trans Metro Bandung*. Jurnal Penelitian Transportasi Darat. Volume 17.
- Loudwik, Dody Kaya. Dkk. (2017). *Evaluasi Kebijakan One Way Traffic Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Manado*. Jurnal Eksekutif. Volume 2.

Priatama, Reditya Fila. Subowo, Arie. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang Rute Koridor VI Jurusan UNDIP-UNNES*. Journal of Public Policy and Management.

Siregar, Suchi ramadhani. Dkk. (2017). *Evaluasi Kebijakan Transportasi Publik Dalam Rangka Mengatasi Kemacetan dan Kepadatan Lalu Lintas di Medan*. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik. Volume 4.

Utomo, Aji Tri. Marom, Aufarul. 2017. *Evaluasi Pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Semarang*. Journal of Public Policy and Management.

**Regulasi:**

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015.

PERDA Kota Semarang NO. 14 Tahun 2016 tentang “Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang”.

Peraturan Walikota Semarang No. 1 Tahun 2017 tentang “Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas) Trans Semarang”.

Peraturan Walikota Semarang NO. 2 Tahun 2017 tentang “Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) Trans Semarang sebagai BLU (Badan Layanan Umum)

Peraturan Walikota Semarang NO. 3 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal BLU (Badan Layanan Umum) dari UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas) Trans Semarang